

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Desa Teluk limau merupakan desa yang heterogen. Masyarakatnya terdiri dari beragam suku dan etnis, mulai dari suku Melayu Bangka, Buton, Tionghoa, Jawa dan Palembang. Ditengah keberagaman itu masyarakat mampu untuk hidup dengan rasa toleransi yang tinggi tanpa membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, sehingga terciptalah pola kehidupan sosial yang harmonis.

Pola kehidupan sosial masyarakat Teluk Limau dapat dilihat dari sistem kekerabatan yang terjalin diantara masyarakatnya yang terbentuk berdasarkan tiga faktor pendorong yaitu banyaknya keluarga besar yang ada di Desa Teluk Limau, fungsi pernikahan sebagai penyatu dua keluarga dan fungsi pantai terhadap pola hubungan sosial masyarakat pesisir. Sistem kekerabatan ini juga mendorong timbulnya modal sosial yang kuat didalam masyarakat seperti solidaritas yg kuat, rasa empati antar sesama masyarakat serta sifat saling tolong menolong yang sering ditunjukkan masyarakat.

Pada tahun 2011 dan tahun 2015 lalu pernah terjadi konflik di Desa Teluk Limau. Konflik yang terjadi disebabkan oleh isu-isu kepentingan yang disebarkan oleh beberapa agen kepentingan seperti pengusaha Kapal Isap Industri (KIP) yang mencoba untuk beroperasi di wilayah perairan laut Desa Teluk Limau dan Bupati Bangka Barat yang menggunakan otoritasnya dengan memberikan izin operasi

kepada KIP. Isu ini kemudian ditanggapi dengan beragam sikap oleh masyarakat, ada masyarakat yang mendukung (pro) dan ada juga masyarakat yang menolak (kontra). Masyarakat pro dan kontra ini juga teridentifikasi sebagai kelompok kepentingan baru, pihak pro berkepentingan memperoleh keuntungan dari KIP, sedangkan pihak kontra berkepentingan untuk menjaga ekosistem laut dan mempertahankan budaya hidup masyarakat pesisir.

Pihak kontra yang tergolong kedalam kelompok kepentingan, kemudian melakukan gerakan-gerakan untuk mencapai tujuannya yaitu menghentikan dan mengusir KIP dari wilayah perairan laut Desa Teluk Limau. Gerakan yang dilakukan dimulai dari demonstrasi di beberapa tempat sampai dengan gerakan yang bersifat anarkisme dengan melakukan penghentian paksa KIP dan merusak beberapa rumah warga yang dianggap pro kapal isap.

Terjadinya konflik yang disertai dengan tindakan kekerasan ini menimbulkan dampak negatif terhadap sistem kekerabatan yang ada di Desa Teluk Limau. Sistem kekerabatan yang selama ini terbentuk di dalam masyarakat menjadi memudar. Pudarnya sistem kekerabatan ini dapat dilihat dari rusaknya faktor pendorong yang menjadi pembentuk sistem kekerabatan serta lunturnya modal sosial yang dibentuk oleh sistem kekerabatan yang kuat.

B. Implikasi Teoretis

Dalam penelitian ini analisis permasalahan dilakukan dengan menggunakan teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Pertama Dahrendorf mengatakan bahwa Masyarakat disatukan oleh ketidakbebasan yang dipaksakan. Dengan demikian, posisi tertentu di dalam masyarakat menggunakan kekuasaan dan otoritas terhadap posisi yang lain. Perbedaan distribusi otoritas selalu menjadi faktor yang menentukan konflik sosial sistematis. Di Desa Teluk Limau konflik yang terjadi salah satunya disebabkan oleh Bupati Bangka Barat yang menggunakan kekuasaan dan otoritasnya dengan cara memberikan izin kepada pemangku kepentingan yaitu Kapal Isap Produksi (KIP) untuk beroperasi di perairan laut Desa Teluk Limau. Izin yang dikeluarkan oleh bupati ini menimbulkan polemik dan mendorong masyarakat untuk melakukan gerakan-gerakan penuntutan agar bupati mencabut izin tersebut dan mengusir KIP dari wilayah perairan Desa teluk Limau.

Selanjutnya Dahrendorf mengatakan, mereka yang berada pada kelompok atas (penguasa) ingin tetap mempertahankan status quo sedangkan mereka berada di bawah (yang dikuasai atau masyarakat) ingin supaya ada perubahan. Gerakan-gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Teluk Limau salah satu tujuannya adalah untuk melakukan perubahan agar bupati tidak bisa semena-mena menggunakan otoritasnya terhadap masyarakat. Namun disisi lain, Bupati sebagai orang yang mempunyai otoritas dan berhak mempertahankan otoritasnya ingin tetap mempertahankan status quo nya. Hal ini yang membuat gerakan yang dilakukan masyarakat Desa Teluk Limau menjadi sia-sia, bahkan setelah beberapa kalipun

masyarakat melakukan demonstrasi, bupati tetap tidak mengabulkan Tuntutan masyarakat.

Dalam teorinya, Dahrendorf membagi kelompok sosial menjadi tiga tipe kelompok. Pertama, kelompok semu (quasi groups) yaitu kelompok yang hanya memiliki kepentingan pada level individu, tersimpan di pikiran bawah sadar. Kelompok semu dapat menjadi kelompok kepentingan (interest group) manakala sudah memiliki kesadaran bersama akan suatu kepentingan yang harus diperjuangkan. Pada fase itu, terjadi proses pembentukan kelompok yang terorganisasi dengan rapi. Kelompok tersebut siap untuk melakukan gerakan perlawanan terhadap posisi dominan kelompok kepentingan lainnya. Kelompok ketiga yaitu kelompok konflik yaitu kelompok yang terbentuk dari kelompok-kelompok kepentingan yang melakukan tindakan.

Tiga tipe kelompok yang dikemukakan oleh Dahrendorf juga terdapat pada masyarakat Desa Teluk Limau. Masyarakat awalnya teridentifikasi sebagai kelompok semu, lantaran kepentingannya masih berada pada level individu dan belum naik kepermukaan. Kepentingan masyarakat yang masih tersembunyi yaitu kepentingan untuk masih tetap bisa memanfaatkan SDA pesisir serta kepentingan untuk ikut merasakan juga dana fee dari kapal isap. Kelompok semu ini kemudian berkembang mejadi kelompok kepentingan ketika masyarakat desa Teluk Limau sudah memiliki kesadaran bersama terhadap kepentingan mereka yang harus diperjuangkan. Lalu masyarakat membentuk kelompok perjuangan yang terorganisir terdiri dari masyarakat biasa, kelompok nelayan serta dibantu oleh beberapa lembaga dengan rencana menuntut kepada Bupati untuk menghentikan

dan mengusir KIP dari Desa Teluk Limau. Setelah dari kelompok kepentingan akhirnya berubah menjadi kelompok konflik yang melakukan berbagai gerakan untuk memaksa KIP agar pergi dari perairan laut Desa Teluk Limau.

Dalam aspek terakhir teorinya Dahrendorf mengemukakan hubungan antara konflik dan perubahan. Konflik juga menyebabkan perubahan dan perkembangan. Singkatnya Dahrendorf menyatakan bahwa segera setelah kelompok konflik muncul, kelompok itu melakukan tindakan yang menyebabkan perubahan dalam struktur sosial. Bila konflik itu hebat, perubahan yang terjadi adalah radikal. Bila konflik disertai tindakan kekerasan, akan terjadi perubahan struktur secara tiba-tiba. Pada konflik yang terjadi di Desa Teluk Limau, gerakan terakhir yang dilakukan kelompok konflik adalah gerakan anarkisme dengan kekerasan yaitu melakukan pemberhentian paksa KIP dan perusakan terhadap beberapa rumah warga yang pro KIP. Tindakan yang dilakukan oleh masyarakat ini pada akhirnya berpengaruh terhadap sistem kekerabatan yang ada di Desa Teluk Limau. Sistem kekerabatan yang sejak lama terjalin nampak mulai menghilang. Dimulai dari rusaknya faktor pendorong yang membentuk sistem kekerabatan seperti keluarga besar, pernikahan dan fungsi pantai, sampai kepada hilangnya modal sosial yang tertanam di dalam kehidupan masyarakat, seperti tali silaturahmi yang terputus, interaksi yang buruk sampai kepada melemahnya sifat tolong menolong dan gotong royong masyarakat.

C. Saran

Kepada masyarakat Desa Teluk Limau : sistem kekerabatan yang selama ini dijalankan merupakan sesuatu yang sangat positif dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat. Sistem kekerabatan yang terjalin didalam masyarakat selama ini telah mampu membentuk masyarakat Teluk Limau menjadi masyarakat yang memiliki rasa solidaritas yang tinggi dan hidup dengan tentram ditengah kondisi heterogenitas masyarakatnya serta telah menciptakan modal sosial yang kuat didalam kehidupan bermasyarakat seperti tingginya rasa empati yang mendorong masyarakat untuk selalu bergotong royong dalam mengerjakan berbagai hal. Berdasarkan dari hal ini peneliti beranggapan bahwa sayang sekali kalau sampai sistem kekerabatan yang selama ini telah dijalani akan hilang begitu saja, masyarakat bisa saja memiliki perbedaan pendapat dan tentu saja suatu konflik didalam kehidupan sosial memang tidak dapat untuk dihindari, namun alangkah lebih baiknya kalau masyarakat mampu untuk berfikiran lebih bijak dan mengenyampingkan kepentingan individu diatas kepentingan umum. Dan menjadikan konflik yang pernah terjadi sebagai suatu pelajaran agar masyarakat bisa terintegrasi kembali.

Kepada pemerintah : pemerintah merupakan orang-orang yang diberikan tanggung jawab oleh masyarakat untuk dapat mengatur dan mengembangkan daerah serta masyarakat yang berdomisili didalamnya. Untuk mempermudah menjalankan tugasnya pemerintah diberikan otoritas untuk memerintah dan mengatur. Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Desa Teluk Limau peneliti

menyarankan kepada pemerintah agar dapat menggunakan otoritas tersebut dengan sebagaimana mestinya, pemerintah sebagai orang yang dipilih oleh rakyat seharusnya mengedahulukan kepentingan dan kesejahteraan rakyat dibandingkan hal lainnya. Pemerintah seharusnya meninjau lebih dalam lagi mengenai pemberian izin usaha atau hal apapun agar tidak terkesan menggunakan otoritasnya secara sembarangan dan agar kasus serupa seperti yang terjadi di Desa Teluk Limau tidak terulang kembali.

